

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN OLEH DINAS SOSIAL MELALUI
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN TELUK AMBON KOTA
AMBON PROVINSI MALUKU**

Zahran Hananto Putra

NPP. 30.1392

Asdaf Kota Ambon, Provinsi Maluku

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: zahranputra11@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. Dyah Poespita E,M.P

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The PKH program in Maluku Province has been implemented since 2013. The reduction in the number of poor people over the last three years shows how serious the Ambon City Government is in reducing poverty, but on the other hand, the number of people receiving benefits has increased in the last three years. Teluk Ambon sub-district is a sub-district that receives the PKH program, and continues to experience an increase in the number of poor people from 2019-2020 Teluk Ambon sub-district as a sub-district close to city access, occupies the three sub-districts with the most poor people in Ambon City. **Purpose:** This research aims to know and describe the empowerment of the poor through the Family Hope Program (PKH). **Method:** This research uses a descriptive qualitative method with an inductive approach. The data collection technique in writing this thesis uses passive participatory observation which is then supported by semi-structured interviews with purposive sampling and snowball sampling which are used to collect documents and strengthen the data seen through four dimensions of Mardikanto's Theory (2013) namely Human Development, Business Development, Institutional Development, and Environmental Development. **Result:** Human Development, Business Development, Institutional Development, and Environmental Development. Based on the research results obtained, the empowerment of the poor through has been running even though there are still several aspects that need to be improved. Mardikato's theory is used as a *ladansan* to analyze research through four dimensions. **Conclusion:** In all dimensions there are several aspects that need to be improved in the dimension, Human Development there are several obstacles, namely the lack of confidence and training for KPM, Business Development is not optimal due to the low confidence of KPM in opening a business, Institutional Development has been carried out well, Environmental Development is lack of environmental utilization.

Keywords: Empowerment, Poor People, Social Service, PKH

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP):Program PKH yang ada di Provinsi Maluku diterapkan sejak tahun 2013. Berkurangnya jumlah penduduk miskin selama tiga tahun terakhir menunjukkan bagaimana keseriusan Pemerintah Kota Ambon dalam menekan jumlah kemiskinan, namun disisi lain peningkatan jumlah masyarakat yang menerima manfaat bertambah tiga tahun terakhir. Kecamatan Teluk Ambon ialah kecamatan yang menerima program PKH, dan terus mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun 2019-2020 Kecamatan Teluk Ambon sebagai kecamatan yang dekat dengan akses kota, menduduki tiga kecamatan dengan penduduk miskin terbanyak di Kota Ambon. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH). **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan observasi partisipasi pasif yang kemudian ditunjang dengan wawancara semi terstruktur dengan purposive sampling dan snowball sampling yang digunakan untuk mengumpulkan dokumen serta memperkuat data dilihat melalui empat dimensi dari Teori Mardikanto (2013) yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lembaga, dan Bina Lingkungan. **Hasil/Temuan:** Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lembaga, dan Bina Lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pemberdayaan masyarakat miskin melalui telah berjalan walaupun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Teori Mardikato dijadikan landasan untuk menganalisis penelitian melalui empat dimensi. **Kesimpulan:** Pada keseluruhan dimensi terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan pada dimensi, Bina Manusia terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya kepercayaan diri dan pelatihan bagi KPM, Bina Usaha belum optimal karena rendahnya kepercayaan diri KPM dalam membuka usaha, Bina Lembaga telah terlaksanakan dengan baik, Bina Lingkungan kurangnya pemanfaatan lingkungan.

Kata kunci: Pemberdayaan, Masyarakat Miskin, Dinas Sosial, PKH

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah program yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang di atur dalam Peraturan Menteri Sosial No 1 tahun 2018. Program PKH ini diharapkan agar kedepannya dapat menjadi salah satu indikator pendorong kepada masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan yang di berikan untuk bekerja sama mencetak SDM yang unggul dan berkualitas, dan juga menekan angka kemiskinan di Indonesia. Provinsi Maluku merupakan provinsi miskin ke empat dengan tingkat kemiskinan mencapai 16,30%. Provinsi Maluku memiliki jumlah penduduk yang meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan jumlah peningkatan penduduk dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 19%, dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 32% dengan rata-rata pertumbuhan selama 3 tahun sebesar 35%. Tabel 1.4 menunjukkan jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku.

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk Miskin di
Provinsi Maluku 2018-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	Presentase Penduduk Miskin
2018	1.773.776	18,12%
2019	1.802.870	17,69%
2020	1.831.880	17,44%

Sumber : BPS Provinsi Maluku Tahun 2022

Tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku yang tergolong besar, maka pemerintah teruserupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diharapkan dapat mampu mengatasi kemiskinan di Provinsi Maluku. Program Keluarga Harapan sudah ada di Provinsi Maluku sejak tahun 2013. Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku terdata melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 371.650 jiwa, tahun 2019 sebanyak 384.132 jiwa, dan tahun 2020 sebanyak 387.102.

Jumlah penduduk yang setiap tahunnya bertambah, menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk tetap menjaga agar ekonomi di Kota Ambon tetap stabil. Penduduk miskin di Kota Ambon berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018 jumlah keluarga misin sebanyak 21.540 jiwa, tahun 2019 sebanyak 21.706 jiwa, dan tahun 2020 sebanyak 20.237 jiwa. Jumlah penduduk miskin yang berkurang selama tiga tahun kebelakang, menunjukkan keseriusan pemerintah Kota Ambon dalam menekan jumlah kemiskinan tetapi. peningkatan jumlah masyarakat penerima manfaat bertambah tiga tahun terakhir. Tahun 2018 jumlah penerima manfaat sebesar 7.181, tahun 2019 sebesar 7.161, dan tahun 2020 sebesar 7.368. Tabel 1.5 di halaman sembilan menunjukkan data jumlah penduduk, keluarga miskin, dan penerima manfaat di Kota Ambon dari tahun 2018 sampai tahun 2020.

PKH mulai di laksanakan di Kota Ambon pada tahun 2013, awalnya program ini dilaksanakan hanya pada empat kecamatan yaitu Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Teluk Ambon, dan Kecamatan Baguala. Pada tahun 2015 bertambah jumlah satu kecamatan yaitu Kecamatan Leitimur Selatan yang tersebar di delapan ke lurahan. Pada tahun 2020 berdasarkan data dari Dinas Sosial, seluruh kecamatan di Kota Ambon telah menjalankan program ini dengan jumlah rumah tangga miskin penerima manfaat hampir mendekati 8000 keluarga miskin. Pemerintah Kota Ambon menargetkan dengan adanya PKH, angka kemiskinan di Kota Ambon bisa menurun setiap tahunnya dan memutus rantai kemiskinan yang ada di Kota Ambon.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kecamatan Teluk Ambon merupakan salah satu kecamatan yang menerima bantuan PKH dari lima kecamatan yang berada di Kota Ambon. Jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Teluk Ambon pada tahun 2020 sebanyak 4.133 jiwa, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2019 dan 2018. Pada tahun 2019 jumlah masyarakat miskin Kecamatan Teluk Ambon sebanyak 1.405 jiwa dan tahun 2018 sebanyak 1.505 jiwa. Jumlah tersebut menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk berupaya menekan jumlah kemiskinan dengan melakukan berbagai program salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) (Lauren, 2020). Kecamatan Teluk Ambon dengan luas wilayah mencapai 93.68 Km² menjadi kecamatan ketiga dengan jumlah penduduk miskin terbanyak setelah

Kecamatan Sirimau dan Nusaniwe. Kecamatan Teluk Ambon merupakan Kecamatan yang tergolong maju dari segi pembangunan infrastruktur karena berada di jalur utama menuju ke pusat kota. Ketersediaan fasilitas publik sudah sangat memadai terutama fasilitas di bidang pendidikan dan kesehatan. Berbanding terbalik dengan Kecamatan Sirimau dan Nusaniwe, wilayah kecamatan tersebut masih belum tergolong kecamatan yang maju, karena pembangunan infrastruktur yang belum merata, fasilitas publik yang masih kurang seperti sarana pendidikan dan kesehatan karena jauh dari pusat kota menyebabkan kecamatan tersebut memiliki penduduk miskin terbanyak di Kota Ambon.

Kecamatan Teluk Ambon sudah menjalankan program ini akan tetapi belum terakomodir dengan baik. Program ini seharusnya dikhususkan kepada masyarakat miskin, tetapi menurut pendamping PKH di Kecamatan Teluk Ambon hanya sekitar 28.19% masyarakat miskin yang menerima manfaat PKH. Hal ini terjadi karena pada kenyataannya masih ada masyarakat penerima program ini yang tergolong mampu, dikarenakan validisasi data yang belum akurat.

Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat miskin belum maksimal karena hanya dilaksanakan satu kali dalam sebulan bahkan tidak sama sekali. Oleh karena itu banyak masyarakat miskin yang bahkan belum mengetahui apa itu PKH dan persyaratan untuk menerima PKH apa saja. Kurangnya sosialisasi mengakibatkan banyak sekali masyarakat miskin tidak ikut serta dan berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian Fransisco Rizal berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi Di Desa Parijatah Wetan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi (Fransisco, 2019) menemukan bahwa Masyarakat dapat menciptakan kemandirian ekonomi melalui berbagai strategi dan program pemberdayaan yang dilakukakan, akan tetapi para pendamping PKH yang seharusnya mendampingi masyarakat belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Penelitian oleh Hoerunni'mati Sangadah dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas) (Sangadah, 2020) menemukan bahwa Program Keluarga Harapan menunjukkan bahwa tingkat ekonomi masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Karangnangka dari adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dilihat berdasarkan beberapa aspek yang menentukan keadaan atau tingkat ekonomi masyarakat, yaitu tingkat pendidikan, pendapatan, jenis tempat tinggal serta fasilitas kekayaan.

Penelitian Siti Karlina dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Muara Bakanon Kabupaten Murung Raya (Karlina, 2022) menemukan bahwa Hasil penelitian menunjukkan Program Keluarga Harapan (PKH) menciptakan perubahan yang positif kepada masyarakat yakni memberikan harapan untuk hidup lebih baik dengan bersekolah tanpa mengkhawatirkan masalah ekonomi, maka permasalahan sosial ekonomi di Muara Bakanon dapat teratasi. Strategi pemberdayaan Program Keluarga Harapan (PKH) masih belum memenuhi standar ideal, beberapa aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat belum terpenuhi, seperti pengembangan kelembagaan kelompok, penyediaan informasi tepat guna, dan pengembangan usaha produktif belum terealisasi. Program Keluarga harapan (PKH) di Muara Bakanon terlihat menerapkan strategi *relief and welfare*, yakni strategi yang lebih mengutamakan pada kekurangan dan kebutuhan setiap individu dan masyarakat. Penelitian Mety Andriyani dengan judul Pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bojongsari Depok Jawa Barat (Andriyani, 2020)

menemukan bahwa, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa terbantu dan terpenuhi kebutuhannya dalam segi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosialnya. Program Keluarga Harapan dengan bantuan pendamping telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi keluarga penerima manfaat yaitu sebuah usaha bersama menuju masyarakat yang mandiri. Program Keluarga Harapan ini juga memberikan sebuah pelatihan rutin bulanan dengan tujuan mengubah pola perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik dalam kehidupan bersosial. Penelitian Jael Murib dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Ranotana Weru (Murib, 2018). Hasil dari penelitian ini adalah membuktikan bahwa, pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin di Desa Ranotana Weru adalah sangat baik segi dari keperluan rumah tangga, kesehatan dan pendidikan.

1.4. Pernyataan Kebaruan

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Pemberdayaan masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari teori (Mardikanto, 2013) yang melihat pemberdayaan dari empat dimensi bina, yaitu bina manusia, bina usaha, bina lembaga dan bina lingkungan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena peneliti hendak mengeksplorasi pengalaman praktek baik yang dilakukan oleh dinas sosial Kota Ambon dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui program PKH di Kecamatan Teluk Ambon. Sementara itu pendekatan induktif digunakan dengan cara memahami pengalaman-pengalaman stakeholder (pihak yang terkait) dalam pemberdayaan masyarakat miskin oleh dinas sosial Kota Amon melalui program PKH yang ada di Kecamatan Teluk Ambon .

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data baik primer maupun sekunder, Sumber data primer diperoleh melalui dokumen utama yang berkaitan dengan PKH di Kecamatan Teluk Ambon serta informan terkait dengan penelitian, sementara sumber sekunder penulis berupa gambaran umum dari objek penelitian yang diambil oleh penulis. Dalam menentukan sumber informan penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Sementara dalam pengumpulan data penulis melakukan melalui tahapan wawancara, semi terstruktur, observasi non partisipan dan dokumentasi. Dalam melakukan analisis data penulis melakukan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis bagaimana pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon yang dilihat berdasarkan dimensi pada teori Mardikanto yaitu bina manusia, bina usaha, bina lembaga, dan bina lingkungan yang dijelaskan sebagai berikut.

3.1. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Oleh Dinas Sosial Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku

a. Bina Manusia

upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat serta menjadi upaya pertama dan utama yang harus diperhatikan, dilihat dari dua indikator yaitu :

1) Peningkatan Kapasitas Individu

Berkaitan dengan bina manusia dalam hal ini penguatan kapasitas individu melalui program P2K2. P2K2 merupakan pertemuan peningkatan kapasitas keluarga terkhususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas KPM. P2K2 dilakukan tiga kali per tiga bulan di setiap desa/kelurahan oleh para pendamping PKH di wilayah dampungannya masing-masing. Sosialisasi ini dilakukan dalam upaya peningkatan kapasitas individu masyarakat di berbagai bidang dalam PKH, yakni bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sejauh ini program P2K2 yang dilakukan oleh pendamping PKH sudah berjalan dengan baik dan tingkat partisipasi masyarakat juga cukup baik. P2K2 yang dilakukan dengan cara memberikan materi kepada KPM. Materi-materi tersebut berupa modul yang sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial. Dengan adanya program P2K2 ini dalam upaya peningkatan kapasitas KPM diharapkan masyarakat dapat menjalankan dan mempedomani setiap modulnya dengan baik agar dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan menambah wawasan serta tujuan utama dari PKH dapat tercapai yaitu berkurangnya angka kemiskinan di Kota Ambon .

2) Pengembangan Jaringan Kerja Sama

Pengembangan jaringan kerja sama dalam upaya bina manusia yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Ambon adalah upaya kerja sama dengan masyarakat KPM. Kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Ambon adalah dengan membentuk sebuah kelompok masyarakat KPM dan memilih salah satu anggota kelompok tersebut menjadi ketua kelompok masyarakat KPM pada setiap desa/kelurahan di Kecamatan Teluk Ambon. Di dalam kelompok KPM tersebut terdapat KPM dari berbagai bidang, yakni bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Kelompok masyarakat yang di bentuk diharapkan dapat menambah keterampilan masyarakat untuk berorganisasi dengan baik. Pengembangan jaringan kerja sama dalam upaya yang dilakukan sudah cukup baik dengan membentuk sebuah kelompok masyarakat KPM dan ada ketua kelompok tersebut. Tetapi hal ini belum maksimal karena sampai saat ini belum ada hasil yang diberikan dari kelompok tersebut.

b. Bina Usaha

Bina usaha menjadi suatu upaya dalam setiap pemberdayaan. Dalam hal ini bina usaha berkaitan dengan 3 hal yaitu pemilihan jenis usaha, perencanaan usaha, dan pengembangan jaringan usaha untuk keluarga KPM.

1) Pemilihan Jenis Usaha

Pemilihan jenis usaha ini dilakukan dengan cara mensosialisasi kepada para KPM. Pendamping PKH bekerja keras dengan memberikan berbagai masukan agar KPM bisa membuka usaha demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan KPM itu sendiri.

2) Perencanaan Usaha

Diketahui bahwa dalam hal perencanaan KPM merencanakan dan memperhitungkan modal usaha serta tahapan dalam membuka usaha secara mandiri tanpa ada saran dan masukan dari pemerintah, namun pendamping PKH selalu siap dalam membantu KPM yang mengalami kendala saat menjalankan usahanya.

3) Pengembangan Mitra Kerja Sama

Tujuannya dari kerja sama adalah agar produk yang di perdagangkan bisa terjual di pasar lokal maupun internasional. Akan tetapi sampai saat ini belum ada KPM di

Kecamatan Teluk Ambon yang berhasil kerja sama dengan mitra yang lain. Hal ini didorong karena kurangnya kreativitas dari KPM dalam mengolah produk menjadi bahan yang lebih menarik.

c. Bina Lembaga

Dilihat dari tiga indikator yaitu partisipasi lembaga, kerja sama dengan lembaga dan pembentukan tim pelaksana PKH.

1) Tingkat Partisipasi

Bahwa pemerintah memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan sangat mendukung PKH ini dengan tujuan utama adalah PKH bisa tepat sasaran. Pemerintah sangat berpartisipasi secara aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui PKH dan diharapkan kedepannya program ini dapat terus berjalan dengan baik dibantu juga oleh dukungan masyarakat dan pihak-pihak terkait agar masyarakat miskin di Kota Ambon bisa berkurang.

2) Kerja Sama Antar Lembaga

Tingkat partisipasi pemerintah yang sangat baik tidak terlepas dari kerja sama antar lembaga yang terkait. Dinas Sosial selaku pelaksana PKH ini dalam melaksanakan tugas untuk menjalankan PKH maka Dinas Sosial membangun kerja sama dengan Dinas Pendidikan, dan Kesehatan dengan tujuan agar mempermudah masyarakat KPM dalam mendapatkan fasilitas pendidikan dan Kesehatan. Dalam menjalankan tugas untuk kelancaraan PKH maka yang paling penting adalah koordinasi dan komunikasi antar pendamping dan lembaga terkait. Koordinasi dan komunikasi dilakukan agar dalam proses pelaksanaan PKH jika terdapat suatu kendala bisa dengan cepat mengatasi masalah tersebut.

3) Pembentukan Tim

Pembentukan Tim dalam pemberdayaan masyarakat melalui PKH ini dilaksanakan dengan membentuk Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) yang dibentuk oleh Dinas Sosial yang didalamnya terdapat para Pendamping Program yang ditugaskan ke masing-masing desa/kelurahan untuk mendampingi dan mengarahkan para peserta program ini. Lembaga mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Dinas Sosial sebagai unit pelaksana kegiatan program sejauh ini sudah menjalankan dengan baik, bekerja sama dengan instansi terkait dan membentuk sebuah tim khusus untuk menjalankan PKH agar proses pelaksanaan pemberdayaan bisa mencapai tujuannya.

d. Bina Lingkungan

Dalam dimensi bina lingkungan dilihat dari dua indikator yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis lingkungan dan pelestarian lingkungan.

1) Pemanfaatan Sumber Daya Berbasis Lingkungan

Masyarakat KPM telah memanfaatkan kekayaan alam yang ada untuk dijadikan sumber mata pencaharian, pendamping PKH selalu berupaya memberikan sosialisasi, masukan dan saran kepada para KPM untuk dapat memanfaatkan lingkungan dengan baik dan bisa menghasilkan uang dari lingkungan yang ada. memberikan dukungan kepada para KPM untuk bisa memanfaatkan lingkungan. Dengan adanya dukungan ini diharapkan KPM dapat cerdas untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan dengan baik serta mampu untuk mengelola agar bisa menghasilkan pendapatan demi memenuhi kebutuhan hidup KPM.

2) Pelestarian Lingkungan

Dalam pembimbingan yang dilakukan kepada peserta PKH juga diberikan sosialisasi terhadap peserta PKH yang dilakukan oleh pihak puskesmas untuk menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan. Pelestarian lingkungan sangatlah penting karena sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat KPM. Sosialisasi mengenai pelestarian lingkungan dilakukan di puskesmas Rumah Tiga sebagai puskesmas pusat yang berada di Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon. Melalui observasi yang peneliti lakukan dapat diketahui bina lingkungan yang dilakukan untuk upaya pemanfaatan dan menjaga kelestarian lingkungan sudah berjalan dengan baik.

3.2. Kendala Dalam Proses Pelaksanaan PKH

- a. Kesalahan data dalam penentuan KPM
- b. Rendahnya kepercayaan diri
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana pendamping PKH

3.3. Solusi Dari Kendala Dalam Proses Pelaksanaan PKH

- a. Memperbaiki sistem dalam mendata KPM untuk menerima PKH
- b. Meningkatkan kepercayaan diri para KPM
- c. Menyediakan sarana dan prasarana bagi para pendamping PKH
- d.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program pemberdayaan masyarakat miskin oleh dinas sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku diharapkan mampu untuk mendorong masyarakat agar bisa hidup mandiri dan tidak bergantung pada bantuan dari Pemerintah Kota Ambon. Penulis menemukan temuan penting yakni keberhasilan PKH di Kecamatan Teluk Ambon sangat dipengaruhi oleh bagaimana kerjasama antar instansi pemerintah Kota Ambon dalam hal ini dinas sosial, dinas Kesehatan dan dinas pendidikan kota Ambon dalam melaksanakan PKH yang ada di Kecamatan Teluk Ambon.

Berbeda dengan penelitian (Andriyani, 2020) yang menyatakan bahwa program PKH yang ada di Kecamatan Bojongsari yang mampu merubah pola pikir dan karakter masyarakat untuk hidup lebih mandiri dan mampu menciptakan lapangan kerja yang baru, pemberdayaan melalui program PKH yang ada di Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon masih belum mampu untuk memandirikan masyarakat yang didorong oleh faktor kurangnya kepercayaan diri pada masyarakat KPM, sehingga mereka terus bergantung pada bantuan dari pemerintah. Selain itu dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Teluk Ambon ini, KPM sangat berusaha untuk mendorong masyarakat menjadi lebih baik dan memberikan pendampingan pada masyarakat secara konsisten.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku dilihat dari teori pemberdayaan menurut Mardikanto (2013) yang terdiri dari bina manusia, bina usaha, bina lembaga dan bina lingkungan secara keseluruhan telah sesuai dan terlaksana dengan baik walaupun masih terdapat beberapa aspek yang perlu dioptimalkan. Pada dimensi bina manusia perlu ditingkatkan pengembangan skill masyarakat KPM serta tinjauan ulang terhadap proses kerja sama yang dilakukan KPM agar mampu membantu KPM dalam meningkatkan kapasitas diri, pada dimensi bina usaha perlu ditingkatkan pengembangan mitra kerjasama, dengan membantu KPM menciptakan produk yang inovatif, pada dimensi bina lembaga telah terlaksana dengan baik, pada bina lingkungan pemanfaatan sumber daya berbasis lingkungan belum mampu dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat KPM Kecamatan Teluk Ambon.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Ambon sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori Mardikanto

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat miskin oleh dinas sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Sosial Kota Ambon beserta jajarannya, Ibu Camat Kecamatan Teluk Ambon beserta jajarannya, pendamping PKH Kecamatan Teluk Ambon dan masyarakat KPM Kecamatan Teluk Ambon yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal- Jurnal :

Andriyani, M. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Bojongsari Depok Jawa Barat* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49861>

Fransisco, R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi Di Desa Parijatah Wetan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi* [Institut Agama Negeri Islam Jember]. <http://digilib.uinkhas.ac.id/2192/>

Karlina, S. (2022). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN MUARA BAKANON KABUPATEN MURUNG RAYA. *HUMA*, 1. <https://ppis.ulm.ac.id/index.php/JH/article/view/2>

Lauren, S. (2020). EVALUASI KUALITAS PELAYANAN HIMBARA TERHADAP PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KOTA AMBON. *BADATI ILMU SOSIAL DAN POLITIK UKIM*, 2. <https://ambon.go.id/dinas-sosial>

Mardikanto, T. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat : Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Murib, J. (2018). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN RANOTANA WERU. *AGRI-SOSIOEKONOMI*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jisep/article/view/19383>

Sangadah, H. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas)* [State Islamic University Prof. K.H Saifuddin

Zuhri]. <https://repository.uinsaizu.ac.id/8493/>

B. Peraturan Menteri Sosial :

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

C. Lain-Lain :

BPS Provinsi Maluku “Maluku dalam angka 2022”

